

REPRESENTASI AKTOR SOSIAL DALAM PEMBERITAAN AKSI MAHASISWA 24 SEPTEMBER 2019 DI MEDIA *CNNINDONESIA.COM*

Salsabila¹, Kholid Abdullah Harras², Undang Sudana³
Universitas Pendidikan Indonesia
biaslsbl@student.upi.edu¹, kholid_harras@upi.edu², undangsudana@upi.edu³

Abstrak

Aksi mahasiswa 24 September 2019 menjadi salah satu aksi mahasiswa yang memiliki sejarah penting bagi bangsa Indonesia. Mahasiswa seluruh Indonesia hadir untuk melakukan penolakan terhadap pengesahan revisi Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) dan revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)/Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Berbagai media pemberitaan, baik nasional maupun internasional turut memberitakan peristiwa ini. Salah satunya adalah media *cnnindonesia.com*. Dalam penelitian ini dibahas lebih lanjut mengenai representasi aktor sosial dalam pemberitaan aksi mahasiswa 24 September 2019 di media *cnnindonesia.com*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tuturan inklusi dan eksklusi sesuai dengan teori Van Leeuwen dengan desain penelitian deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini, terdapat 187 kalimat (50,40%) yang termasuk strategi inklusi. Semua kalimat tersebut terbagi menjadi 2 diferensiasi, 16 indiferensiasi, 3 objektivasi, 11 nominasi, 42 kategorisasi, 28 determinasi, 14 indeterminasi, 48 asimilasi, dan 23 individualisasi. Selanjutnya, terdapat enam belas kalimat (4,31%) yang termasuk strategi eksklusi. Enam belas kalimat terbagi atas, 9 pasivasi, 4 nominalisasi, dan 3 pergantian anak kalimat. Selain itu, terdapat 79 aktor sosial (21,29%) dan 89 aksi sosial (23,98%). Aksi sosial tersebut terbagi atas 76 aksi dan 13 reaksi. Dalam teks berita “Kronologi Aksi Mahasiswa di DPR Berujung Rusuh Versi Polisi” terdapat dua aktor penting, di antaranya Irjen Gatot Eddy Pramono seorang Kapolda Metro Jaya dan mahasiswa. Aktor Irjen Gatot Eddy Pramono direpresentasikan secara individual dan aktor yang memiliki kekuasaan untuk mengatur aparat kepolisian ketika menghadapi aksi mahasiswa. Hal itu dapat tergambarkan dari dominasi aksi pada aksi sosial yang dilakukannya. Sementara itu, mahasiswa direpresentasikan sebagai sosok yang termarginalkan dalam teks berita tersebut. Dapat terlihat dari penggunaan reaksi pada aksi sosial yang dilakukannya dan kalimat berkonteks negatif.

Kata kunci: representasi aktor sosial, aksi mahasiswa, eksklusi, inklusi

PENDAHULUAN

Representasi aktor sosial merupakan penggambaran aktor sosial dalam suatu pemberitaan di media massa. Menurut Leeuwen (2008, hlm. 23) penggambaran aktor sosial dapat terlihat dari bagaimana penggunaan bahasa dalam media massa tersebut. Dalam media massa, penggunaan bahasanya cenderung memiliki makna tertentu (Leeuwen, 2008, hlm. 23). Leeuwen (2008, hlm. 24) mengatakan bahwa makna biasanya muncul secara sengaja karena adanya tujuan dari kelompok tertentu. Maknanya dapat tergambarkan dengan jelas berdasarkan eksklusi dan inklusi dalam teks berita (Leeuwen, 2008, hlm. 28). Jenis dari inklusi dan eksklusi dapat terlihat dari bagaimana aktor dalam sebuah teks berita disembunyikan atau diperlihatkan secara jelas.

Representasi aktor sosial merupakan hal yang penting untuk dikaji karena melalui representasi aktor sosial dapat terlihat bagaimana cara media massa mengemas sebuah teks berita. Selain itu, dapat terlihat sejauh mana netralitas dari sebuah media massa. Beberapa hal tersebut dapat berujung pada bagaimana media massa mengubah ideologi masyarakat terhadap suatu pemberitaan, terutama pada isu-isu yang sangat sensitif seperti politik.

Kajian mengenai representasi aktor sosial dalam sebuah teks berita yang tercermin dalam penggunaan inklusi dan eksklusi sudah banyak dipublikasikan. Hal tersebut dapat terlihat dari penelitian Rohmawati (2016) mengenai strategi inklusi dan eksklusi dalam wacana pemberitaan kriminal khususnya pada kasus kejahatan seksual pada harian Jawa Pos. Selanjutnya, topik ini terdapat dalam kajian Umayyah (2017) mengenai penggambaran keislaman tokoh Soekarno dalam Majalah *Intisari*. Kemudian, Rilma, dkk., (2019) menganalisis bagaimana kecenderungan sikap dari media daring *sindonews.com*, *vivanews.com*, *detiknews.com*, *kompas.com*, dan *metrotvnews.com* dalam menanggapi kasus tercecernya KTP elektronik. Berdasarkan perkembangan penelitian mengenai representasi aktor sosial dalam teks berita dapat disimpulkan bahwa benar adanya representasi aktor sosial tertentu ada dalam sebuah media massa. Selain itu, representasi aktor sosial juga memiliki kecenderungan mengubah ideologi masyarakat.

Penelitian ini merupakan pembaharuan karena memiliki objek yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Objek yang diambil merupakan kasus aksi mahasiswa mengenai penolakan pengesahan revisi Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) dan revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)/Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Pemberitaan tersebut masih hangat dibicarakan oleh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia.

Pemberitaan tersebut tidak hanya menjadi bahan pemberitaan di Indonesia, tetapi juga sudah sampai media internasional. Di antaranya terdapat berita yang dilansir oleh Mashable SE Asia (2019) dengan judul *Here's The Rundown on What's Really Going On With The Protest in Indonesia*. Pemberitaan tersebut menjelaskan apa saja aspek yang akan diprotes oleh mahasiswa di gedung DPR/MPR dan mengapa hal tersebut bisa terjadi. Selain itu, terdapat beberapa cuplikan video yang menunjukkan masifnya penolakan kebijakan tersebut dalam media sosial. Selanjutnya, The New York Times (2019) juga memberitakan hal yang berkenaan dengan aksi mahasiswa di gedung DPR/MPR dengan judul *Thousands in Indonesia Protest Bills to Limit Rights and Ban Extramarital Sex*. Pemberitaan tersebut berisi mengenai penjelasan mayoritas dari mahasiswa mengapa mengadakan aksi tersebut dan menuntut adanya pembatalan RKUHP bukan menunda untuk disahkan. Selain itu, tuntutan tersebut juga diadakan untuk menegakkan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi warga negara Indonesia dalam berbagai kasus yang terjadi di Indonesia.

Politik dan aksi sudah tentu menjadi satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan karena aspirasi masyarakat secara umum dapat tersampaikan. Aksi juga merupakan jalan untuk menyampaikan kritik pada pemerintah apabila terdapat kebijakan yang dinilai tidak sesuai dengan pandangan hidup masyarakat Indonesia.

Aksi pada hari Selasa, 24 September 2019 merupakan hari yang bersejarah bagi Indonesia karena pada hari itu gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi saksi bisu bagi pengulangan tragedi 1998. Tragedi 1998 merupakan peristiwa penurunan secara "paksa" Soeharto oleh aliansi mahasiswa di Indonesia. Sementara itu, aksi yang terjadi pada 24 September 2019 bertujuan untuk menyampaikan tujuh tuntutan mahasiswa. Berdasarkan pemberitaan *news.detik.com* (26/09), tujuh tuntutan tersebut ialah (1) penolakan terhadap revisi Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP), (2) revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), (3) isu lingkungan, (4) Rancangan Undang-undang (RUU) Ketenagakerjaan, (5) RUU Pertanahan, (6) RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS), dan (7) kriminalisasi aktivis.

Aksi tersebut dilakukan hingga dini hari. Hal itu menyebabkan banyaknya oknum yang tidak bertanggung jawab menyelip dan membuat kerusuhan. Dengan demikian, banyak mahasiswa dan polisi yang menjadi korban atas terjadinya peristiwa tersebut. Ratusan korban banyak mengalami luka-luka. Selain itu, terdapat pula korban yang meninggal dunia disebabkan kelelahan dan terinjak ketika aksi berlangsung.

Berdasarkan pemberitaan *kompas.com* (2019) yang berjudul "Demo UU KPK dan RKUHP, 232 Orang Jadi Korban, 3 Dikabarkan Kritis" dapat diketahui bahwa total korban mencapai 232 orang, tiga di antaranya dalam kondisi kritis, dan dua korban meninggal dunia. Apabila korban dibagi berdasarkan regional, terdapat 37 mahasiswa dan 3 wartawan di Sulawesi Selatan yang terluka, 3 orang mahasiswa di Sumatera Selatan dalam kondisi kritis, 92 orang mahasiswa dan 9 orang polisi di Bandung terluka, 88 orang di Senayan terluka, serta 2 orang mahasiswa yang berasal dari Kendari meninggal dunia.

Media memiliki berbagai macam cara untuk menyampaikan pola pikir yang akan berpengaruh bagi pembacanya. Salah satunya dengan menggunakan strategi eksklusif dan inklusif dalam teks beritanya. Strategi eksklusif dapat digambarkan dengan cara menyembunyikan kesalahan dari pihak yang memiliki otoritas tertinggi dalam sebuah pemberitaan, sedangkan strategi inklusif dapat digambarkan dengan cara menampilkan kesalahan dari pihak yang dimarginalkan dalam sebuah pemberitaan. Biasanya, media cenderung menampilkan kesalahan pihak yang dimarginalkan secara berlebihan, padahal bisa saja kesalahan terdapat pada kedua belah pihak. Dengan demikian, penggunaan strategi tersebut dapat menimbulkan efek bagi pembaca bahwa kesalahan terbesar terletak pada pihak yang dimarginalkan.

Penelitian ini membahas representasi aktor sosial dalam teks berita yang dipublikasikan oleh media *cnnindonesia.com*. Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi peneliti mengambil pemberitaan kasus aksi mahasiswa mengenai penolakan pengesahan revisi Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) dan revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)/Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Pertama, peristiwa ini salah satu peristiwa penting yang melibatkan aliansi mahasiswa seluruh Indonesia untuk mengkritisi kebijakan pemerintahan. Hal ini dianggap sebagai pengulangan kembali tragedi 1998 dengan tujuan yang berbeda. Kedua, masih banyak ditemukan keberpihakan media dalam memberitakan kasus yang berkaitan dengan pemerintahan. Adanya ketidaknetralan dari suatu media dapat berpengaruh terhadap tanggapan masyarakat dalam suatu kasus yang terjadi di Indonesia. Dalam hal ini ditemukan adanya pernyataan berlebihan, seperti pada pernyataan yang dilansir oleh media *cnnindonesia.com* (2019) "atas aksi itu, polisi kemudian mulai mengambil tindakan tegas. Menurut Gatot, langkah itu diambil lantaran aksi yang dilakukan sudah dapat dikategorikan sebagai tindakan anarkis". Penggunaan kata "anarkis" dinilai terlalu berlebihan karena pada saat itu aksi masih berjalan dengan lancar. Selain itu, keberpihakan dari media juga menjadi penyebab perubahan paradigma masyarakat terhadap suatu kasus pemberitaan. Masyarakat hanya akan melihat suatu pemberitaan dari satu sisi tanpa melihat sisi lainnya, padahal kenetralan media dapat menjadi sarana edukasi agar terciptanya masyarakat yang cerdas dalam menanggapi berbagai kasus yang terjadi.

Selanjutnya, peneliti mengambil pemberitaan dari media *cnnindonesia.com* yang berjudul "Kronologi Aksi Mahasiswa di DPR Berujung Rusuh Versi Polisi". Pemilihan media tersebut atas dasar pertimbangan bahwa media *cnnindonesia.com* termasuk dalam CNN International. Pemberitaan yang dipublikasikan oleh *cnnindonesia.com* diharapkan sudah memenuhi kategori netral. Hal ini sesuai dengan pasal satu Kode Etik Jurnalistik yang menyatakan bahwa "wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk". Pada poin berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara. Hal tersebut bermaksud tidak boleh

ada keberpihakan dari suatu media terhadap pemberitaan kasus apa pun. Dalam kasus tersebut dapat terlihat bahwa media *cnnindonesia.com* memiliki keberpihakan kepada pihak kepolisian, padahal korban yang berjatuh justru banyak yang berasal dari mahasiswa, bukan kepolisian.

Teks berita mengenai pemberitaan aksi mahasiswa 24 September 2019 di media *cnnindonesia.com* dipublikasikan pada Rabu, 25 September 2019. Pemilihan teks berita berdasarkan tanggal tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa diharapkan pemberitaan “Kronologi Aksi Mahasiswa di DPR Berujung Rusuh Versi Polisi” yang membahas penolakan pengesahan revisi Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) dan revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)/Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memiliki tingkat akurasi yang tinggi.

Berdasarkan beberapa alasan yang telah dipaparkan, teori Analisis Wacana Kritis Leeuwen dinilai dapat menjawab representasi aktor sosial dalam kasus aksi mahasiswa mengenai penolakan pengesahan revisi Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) dan revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)/Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Hal ini dapat ditinjau secara mendalam melalui analisis jenis inklusi dan eksklusi dalam pemberitaan mengenai aksi tersebut.

Masalah dalam penelitian ini meliputi dua hal: (1) jenis tuturan inklusi dalam teks berita “Kronologi Aksi Mahasiswa 24 September 2019 di DPR Berujung Rusuh Versi Polisi di media *cnnindonesia.com*; (2) jenis tuturan eksklusi dalam teks berita “Kronologi Aksi Mahasiswa di DPR Berujung Rusuh Versi Polisi” di media *cnnindonesia.com*. Berdasarkan masalah tersebut, peneliti mengkajinya dengan menggunakan beberapa teori yang dapat memecahkan permasalahan mengenai representasi aktor sosial dalam pemberitaan aksi mahasiswa 24 September 2019 di media *cnnindonesia.com*. Teori tersebut bersumber dari Analisis Wacana Kritis.

Analisis Wacana Kritis

Leeuwen (dalam Coulthard & Coulthard, 2003, hlm. 32) menyatakan bahwa analisisnya lebih mengarah pada bagaimana dominasi sekelompok atau golongan tertentu dalam suatu media terhadap golongan marginal. Golongan marginal selalu ditampilkan dalam konteks negatif. Konteks negatif yang digambarkan, misalnya liar, mengganggu ketenteraman, dan sering kali bertindak anarkis. Leeuwen (dalam Coulthard & Coulthard, 2003, hlm. 38) juga menjelaskan bahwa dominasi tersebut dapat terlihat dari penggunaan eksklusi dan inklusi yang diterapkan dalam sebuah pemberitaan di media massa. Eksklusi dan inklusi akan dipaparkan sebagai berikut.

1. Analisis Wacana Kritis
 - a. Eksklusi

Strategi untuk mengeluarkan aktor sosial dari sebuah pemberitaan atau pembicaraan. Eksklusi dibagi menjadi beberapa bagian.

 - 1) Pasivasi;
 - 2) Nominalisasi;
 - 3) Penggantian Anak Kalimat.
 - b. Inklusi

Strategi untuk memasukkan aktor sosial dari sebuah pemberitaan atau pembicaraan.

 - 1) Diferensiasi-Indiferensiasi;
 - 2) Objektivasi-Abstraksi;
 - 3) Nominasi-Kategorisasi;
 - 4) Nominasi-Identifikasi;
 - 5) Determinasi-Indeterminasi;
 - 6) Asimilasi-Individualisasi;
 - 7) Asosiasi-Disosiasi.
2. Representasi Aktor Sosial

Berdasarkan penggambaran pada elemen-elemen dalam praktik sosial, yaitu aktor sosial. Selain itu, adanya pengembangan hubungan antar aktor sosial yang disebut *social actor network*. Seluruh hal tersebut terbagi atas tiga transformasi besar, di antaranya *deletion* atau penghapusan, *rearrangement* atau penyusunan kembali, dan *substitution* atau pengganti.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*. Pengumpulan data menggunakan teknik simak dan catat. Data diambil dari 31 kalimat pada teks berita yang berjudul “Kronologi Aksi Mahasiswa di DPR Berujung Rusuh Versi Polisi” yang dipublikasikan pada Hari Rabu, 25 September 2019 di media *cnnindonesia.com*.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini disajikan hasil analisis mengenai strategi eksklusi, strategi inklusi, dan representasi aktor sosial berdasarkan hubungan antara aktor sosial dan aksi sosial yang dilakukannya (Leeuwen, 2008). Bagian temuan menjawab pertanyaan utama dari penelitian ini, yaitu mengungkapkan representasi aktor sosial dalam media *cnnindonesia.com* dalam pemberitaan aksi mahasiswa mengenai penolakan pengesahan revisi Rancangan Kitab

Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) dan revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)/Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Penggunaan Teori Inklusi pada Pemberitaan Aksi Mahasiswa 24 September 2019 di Media *cnnindonesia.com*

1. Objektivasi-Abstraksi

Tabel 1. Objektivasi/Abstraksi

No.	Kalimat	Objektivasi/Abstraksi
1.	Buntut kerusuhan itu, polisi mengamankan 94 orang .	94 orang (Objektivasi)

2. Nominasi-Kategorisasi

Tabel 2. Nominasi/Kategorisasi

No.	Kalimat	Objektivasi/Abstraksi
1.	Pada pukul 16.00 WIB, mahasiswa mulai meminta untuk bisa berkomunikasi dengan para pimpinan DPR, termasuk ketua DPR RI Bambang Soesatyo.	Kategorisasi
2.	"Tetapi mereka tidak mau mundur , tetapi maju bahkan semakin merusak pagar DPR," ucapnya.	Nominasi

3. Diferensiasi-Indiferensiasi

Tabel 3. Diferensiasi/Indiferensiasi

No.	Kalimat	Objektivasi/Abstraksi
1.	Pertama, pihak kepolisian menembakkan meriam air (<i>water cannon</i>) ke arah mahasiswa dengan tujuan agar mereka mundur.	Diferensiasi
2.	Pukul 16.05 WIB, mahasiswa mulai meneriakkan yel-yel dan berusaha masuk ke dalam area Gedung DPR/MPR.	Indiferensiasi

4. Asimilasi-Individualisasi

Tabel 4. Asimilasi/Individualisasi

No.	Kalimat	Objektivasi/Abstraksi
1.	"Sehingga atas nama undang-undang tentunya polisi melakukan tindakan tegas menembakkan gas air mata kepada pengunjung rasa supaya adik-adik mahasiswa ini mundur," tutur Gatot.	Individualisasi
2.	Selain itu, tiga pos polisi juga dirusak hingga dibakar oleh massa	Asimilasi

5. Determinasi-Indeterminasi

Tabel 6. Determinasi/Indeterminasi

No.	Kalimat	Objektivasi/Abstraksi
1.	Gatot mengklaim langkah tegas yang diambil kepolisian pun dilakukan sesuai dengan aturan.	Indeterminasi
2.	Tetapi mereka tidak mau mundur, tetapi maju bahkan semakin merusak pagar DPR," ucapnya	Determinasi

Penggunaan Teori Eksklusi pada Pemberitaan Aksi Mahasiswa 24 September 2019 di Media *cnnindonesia.com*

1. Pasivasi

Tabel 7. Pasivasi

No.	Kalimat
-----	---------

1.	Aksi yang dilakukan sudah dapat dikategorikan sebagai tindakan anarkis.
----	---

2. Nominalisasi

Tabel 8. Nominalisasi

No.	Kalimat
1.	Antara lain, pagar DPR, mobil pengurai massa milik Polri, mobil meriam air milik Polri, serta bus milik TNI.

3. Penggantian Anak Kalimat

Tabel 9. Penggantian Anak Kalimat

No.	Kalimat
1.	“Sedangkan yang di samping kanan itu sudah mulai merusak pagar DPR karena apa karena tujuannya untuk masuk ke dalam DPR dan ingin menguasai DPR,” ujar Gatot.

Representasi Aktor Sosial pada Pemberitaan Aksi Mahasiswa 24 September 2019 Di Media *cnnindonesia.com*

1. Representasi Irjen Gatot Eddy Pramono sebagai aktor sosial dalam teks berita “Kronologi Aksi Mahasiswa di DPR Berujung Rusuh Versi Polisi”.

Tabel 10. Representasi Irjen Gatot Eddy Pramono sebagai aktor sosial dalam teks berita “Kronologi Aksi Mahasiswa di DPR Berujung Rusuh Versi Polisi”.

No.	Kalimat	Aktor
1.	Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Eddy Pramono mengatakan mahasiswa itu mulai berkumpul untuk demo sejak pukul 08.00 WIB.	Irjen Gatot Eddy Pramono

2. Representasi Jabatan Irjen Gatot Eddy Pramono di Ranah Sosial

Tabel 11. Representasi Jabatan Irjen Gatot Eddy Pramono di Ranah Sosial

No.	Kalimat	Aktor
1.	Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Eddy Pramono mengatakan mahasiswa itu mulai berkumpul untuk demo sejak pukul 08.00 WIB.	Kapolda Metro Jaya

3. Representasi Irjen Gatot Eddy Pramono dalam Institusi/Organisasi

Tabel 12. Representasi Irjen Gatot Eddy Pramono dalam Institusi/Organisasi

No.	Kalimat	Aktor
1.	Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Eddy Pramono mengatakan mahasiswa itu mulai berkumpul untuk demo sejak pukul 08.00 WIB.	Kapolda Metro Jaya

4. Representasi Mahasiswa Secara Umum

Tabel 13. Representasi Mahasiswa Secara Umum

No.	Kalimat	Aktor
1.	Bentrokan pecah antara massa pedemo dengan petugas kepolisian sejak sore hingga Rabu (25/9) dini hari.	Massa pedemo
2.	Kemudian, mulai pukul 14.00 WIB, mahasiswa mulai mencoba masuk ke jalan tol dalam kota arah Cawang-Slipi yang terletak persis di depan Gedung DPR/MPR.	Mahasiswa

Aksi Sosial yang Berhubungan dengan Irjen Gatot Eddy Pramono

Tabel 14. Aksi Sosial yang Berhubungan dengan Irjen Gatot Eddy Pramono

No.	Kalimat	Aksi
1.	Gatot mengungkapkan mahasiswa kemudian menyampaikan bahwa jika pimpinan DPR tidak bisa menemui, mereka tidak akan bertanggung jawab atas apa yang akan terjadi selanjutnya.	Mengungkapkan, menyampaikan

2.	Gatot mengklaim langkah tegas yang diambil kepolisian pun dilakukan sesuai dengan aturan.	Mengklaim, diambil
3.	Gatot menuturkan bentrokan antara massa dan aparat kepolisian berlangsung hingga malam hari. Bentrokan tersebut baru berakhir sekitar pukul 01.15 WIB.	Menuturkan

Aksi Sosial yang Berhubungan dengan Mahasiswa

Tabel 15. Aksi Sosial yang Berhubungan dengan Mahasiswa

No.	Kalimat	Aksi	Reaksi
1.	Pada pukul 16.00 WIB, mahasiswa mulai meminta untuk bisa berkomunikasi dengan para pimpinan DPR, termasuk ketua DPR RI Bambang Soesatyo.	Meminta	-
2.	Pukul 16.05 WIB, mahasiswa mulai meneriakkan yel-yel dan berusaha masuk ke dalam area Gedung DPR/MPR.	Meneriakkan, masuk	-
3.	Lebih lanjut, Gatot menyampaikan bahwa dalam proses pengamanan aksi kemarin, pihaknya telah memberikan toleransi dan ruang kepada mahasiswa untuk menyampaikan aspirasinya.	-	Menyampaikan
4.	"Saya yakin betul bahwa adik-adik mahasiswa adalah mahasiswa-mahasiswa yang cerdas, lakukan dengan cara-cara yang cerdas, dengan cara-cara yang elegan, dengan cara-cara yang tentunya sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang ada," kata Gatot.	-	mundur

Pembahasan

Aksi mahasiswa pada 24 September 2019 merupakan aksi mahasiswa terbesar kedua yang dilakukan setelah aksi pada rezim Soeharto tahun 1998. Berdasarkan hasil analisis ditemukan dua tokoh penting dalam teks berita "Kronologi Aksi Mahasiswa 24 September 2019" di media *cnnindonesia.com*, yaitu Irjen Gatot Eddy Pramono selaku Kapolda Metro Jaya dan mahasiswa. Representasi aktor sosial menunjukkan bagaimana keterlibatan dua aktor penting tersebut terhadap aksi mahasiswa mengenai penolakan pengesahan revisi Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) dan revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)/Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Irjen Gatot Eddy Pramono merupakan Kapolda Metro Jaya direpresentasikan sebagai individu. Hal ini dapat terlihat berdasarkan representasinya dalam teks berita "Kronologi Aksi Mahasiswa di DPR Berujung Rusuh Versi Polisi" di media *cnnindonesia.com*. Irjen Gatot Eddy Pramono diindikasikan sebagai individual ketika memperlihatkan aksi untuk menyelesaikan masalah. Selain itu, representasi terhadap nama panggilan "Gatot" mengesankan pergerakan secara individual yang memiliki kesan akrab antara dirinya dengan masyarakat. Representasi terhadap nama lengkapnya hanya ditunjukkan sekali, yaitu pada kalimat ke tiga dalam teks berita "Kronologi Aksi Mahasiswa di DPR Berujung Rusuh Versi Polisi" di media *cnnindonesia.com*. Pada pergerakan aksi sosial selanjutnya digunakan nama "Gatot".

Irjen Gatot Eddy Pramono dalam nama institusi atau organisasi disebut Kapolda Metro Jaya. Hasil analisis menunjukkan apabila terdapat aksi yang dihubungkan dengan nama institusi atau organisasi, secara tidak langsung mengindikasikan bahwa Kapolda Metro Jaya bertanggung jawab atas aksi mahasiswa yang terjadi. Selanjutnya, bertambah buruknya kondisi ketika aksi berlangsung membuat aparat kepolisian berada pada posisi yang disalahkan.

Mahasiswa merupakan aktor kedua yang berperan penting dalam teks berita "Kronologi Aksi Mahasiswa di DPR Berujung Rusuh Versi Polisi" di media *cnnindonesia.com*. Representasi mahasiswa dalam teks berita tersebut digambarkan dengan mahasiswa/massa/massa pedemo/adik-adik mahasiswa. Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa mahasiswa digambarkan dengan citra negatif. Hal tersebut ditunjukkan oleh banyaknya kalimat yang memiliki konteks negatif ketika membahas mahasiswa. Dalam teks berita tersebut aksi mahasiswa digambarkan secara anarkis dan menyebabkan berbagai kerusakan. Pada aksi sosial yang dilakukan oleh aktor mahasiswa ditemukan dua reaksi. Hal ini secara tidak langsung menyiratkan posisi yang termarginalkan. Lain halnya dengan Irjen Gatot Eddy Pramono, seluruh aksi sosialnya bersifat aksi dan tidak ditemukan reaksi.

Berdasarkan beberapa peristiwa yang berhubungan dengan aksi mahasiswa 24 September 2019, sangat adil untuk mengatakan bahwa terdapat aktor yang berkontribusi serta bertanggung jawab terhadap aksi yang terjadi. Aktor pertama ialah Irjen Gatot Eddy Pramono sebagai Kapolda Metro Jaya yang memiliki wewenang untuk mengatur langkah yang dilakukan kepolisian dalam aksi mahasiswa tersebut. Irjen Gatot Eddy Pramono juga yang memiliki wewenang untuk menjelaskan peristiwa yang terjadi pada aksi mahasiswa 24 September 2019. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya penggunaan aksi pada aksi sosial yang dilakukan oleh aktor pertama, yaitu Irjen Gatot

Eddy Pramono. Aktor tersebut juga memiliki kekuasaan untuk mengatur aparat kepolisian dalam aksi mahasiswa 24 September 2019.

Aktor kedua ialah mahasiswa. Mahasiswa di sini sebagai aktor yang melaksanakan aksi pada 24 September 2019. Aktor ini menuntun penolakan terhadap revisi Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) dan revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di depan Gedung DPR/MPR. Aksi sosial yang dilakukan didominasi oleh aksi, tetapi terdapat beberapa reaksi. Dengan adanya reaksi tersebut, dapat disimpulkan bahwa posisi dari mahasiswa termarginalkan dan tersudutkan. Hal ini juga terlihat dari penggunaan massa/massa pedemo/adik-adik mahasiswa dan banyaknya penggunaan kalimat yang memiliki konteks negatif. Dengan demikian, apa pun yang dilakukan mahasiswa selalu bersifat negatif, anarkis, dan merusak. Beberapa kalimat yang mengandung bentuk pengamanaan kepolisian, seperti “melemparkan *water cannon*”, memperkuat citra buruk mahasiswa dalam teks berita “Kronologi Aksi Mahasiswa di DPR Berujung Rusuh Versi Polisi”.

SIMPULAN

Hasil penelitian ini menemukan enam hal sebagai berikut. Pertama, terdapat 187 kalimat (50,40%) yang termasuk strategi inklusi. Semua kalimat tersebut terbagi atas 2 diferensiasi, 16 indiferensiasi, 3 objektivasi, 11 nominasi, 42 kategorisasi, 28 determinasi, 14 indeterminasi, 48 asimilasi, dan 23 individualisasi. Kedua, terdapat enam belas kalimat (4,31%) yang termasuk strategi eksklusivasi. Enam belas kalimat tersebut terbagi atas 9 pasivasi, 4 nominalisasi, dan 3 pergantian anak kalimat. Ketiga, terdapat 79 aktor sosial (21,29%) dan 89 aksi sosial (23,98%). Aksi sosial tersebut terbagi atas 76 aksi dan 13 reaksi. Keempat, terdapat dua aktor penting dalam teks berita “Kronologi Aksi Mahasiswa di DPR Berujung Rusuh Versi Polisi”, yaitu Irjen Gatot Eddy Pramono sebagai seorang Kapolda Metro Jaya dan mahasiswa.

Kelima, representasi aktor Irjen Gatot Eddy Pramono yang merupakan Kapolda Metro Jaya direpresentasikan sebagai individu. Hal ini dapat terlihat berdasarkan representasinya dalam teks berita “Kronologi Aksi Mahasiswa di DPR Berujung Rusuh Versi Polisi” di media *cnnindonesia.com*. Irjen Gatot Eddy Pramono diindikasikan sebagai individual ketika memperlihatkan aksi untuk menyelesaikan masalah. Selain itu, representasi terhadap nama panggilan “Gatot” mengesankan pergerakan secara individual yang memiliki kesan akrab antara dirinya dengan masyarakat. Representasi terhadap nama lengkapnya hanya ditunjukkan sekali, yaitu pada kalimat ke tiga dalam teks berita “Kronologi Aksi Mahasiswa di DPR Berujung Rusuh Versi Polisi” di media *cnnindonesia.com*. Pergerakan atas aksi sosial selanjutnya digunakan nama “Gatot”. Irjen Gatot Eddy Pramono dalam nama institusi atau organisasi disebut Kapolda Metro Jaya. Hasil analisis menunjukkan apabila terdapat aksi yang dihubungkan dengan nama institusi atau organisasi, hal itu secara tidak langsung mengindikasikan bahwa Kapolda Metro Jaya bertanggung jawab atas aksi mahasiswa yang terjadi. Selanjutnya, bertambah buruknya kondisi ketika aksi berlangsung membuat aparat kepolisian berada pada posisi yang disalahkan.

Keenam, mahasiswa merupakan aktor kedua yang berperan penting dalam teks berita “Kronologi Aksi Mahasiswa di DPR Berujung Rusuh Versi Polisi” di media *cnnindonesia.com*. Representasi mahasiswa dalam teks berita tersebut digambarkan dengan mahasiswa/massa/massa pedemo/adik-adik mahasiswa. Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa mahasiswa digambarkan dengan citra negatif. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya kalimat yang memiliki konteks negatif ketika membahas mahasiswa. Dalam teks berita tersebut, aksi mahasiswa digambarkan secara anarkis dan menyebabkan berbagai kerusakan. Pada aksi sosial yang dilakukan oleh aktor mahasiswa ditemukan dua reaksi. Hal ini secara tidak langsung menyiratkan posisi mahasiswa yang termarginalkan. Lain halnya dengan Irjen Gatot Eddy Pramono, seluruh aksi sosialnya bersifat aksi dan tidak ditemukan reaksi.

Berdasarkan temuan penelitian dapat disimpulkan bahwa aksi mahasiswa tersebut merupakan masalah yang harus diselesaikan karena revisi Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) dan revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di depan Gedung DPR/MPR berpengaruh terhadap seluruh lapisan masyarakat. Ketegasan pemerintah diperlukan dalam memutuskan setiap keputusan yang berhubungan dengan jalannya kehidupan di masyarakat. Selain itu, seharusnya terdapat kerja sama yang baik antara mahasiswa sebagai penyambung “lidah” rakyat dan pihak kepolisian yang merupakan pelindung masyarakat. Dalam konteks ini, pihak kepolisian seyogianya juga menjadi penengah antara mahasiswa dengan pihak pemerintah. Dengan demikian, dapat ditemukan jalan keluar terbaik bagi permasalahan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) dan revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini.

REFERENSI

- Bramasta, D.B. (2019). “Demo UU KPK dan RKUHP, 232 Orang Jadi Korban, 3 Dikabarkan Kritis”. Diakses dari: <https://www.kompas.com/tren/read/2019/09/25/072855665/demo-uu-kpk-dan-rkuhp232-orang-jadi-korban-3-dikabarkan-kritis?page=all/> (20 November 2019).
- Indonesia, CNN. (2019). “Kronologi Aksi Mahasiswa di DPR Berujung Rusuh Versi Polisi”. Diakses dari: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190925113440-20-431795/kronologiaksi-mahasiswa-di-dpr-berujung-rusuh-versi-polisi> (20 November 2019).
- Leeuwen, T. (2008). *Discourse and Practice: New Tools For Critical Discourse Analysis*. New York: Oxford University Press.

- Rilma, R, dan Gani. (2019). “Strategi Pemberitaan di Media Online Nasional Tentang Kasus Tercecernya KTP Elektronik (Analisis Teori Leeuwen)”. *Jurnal Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya: LINGUA XV (P-ISSN 1829 9342, E-ISSN 2549-3183)*. doi: <https://journal.unnes.ac.id>.
- Rohmawati, L. (2016). “Strategi Eksklusi dan Inklusi Wacana Berita Kriminal Pada Media Cetak Harian Jawa Pos: Analisis Wacana Leeuwen”. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Umadiyah, S. (2017). “Kemusliman Soekarno dalam Wacana Media (Analisis Wacana Model Leeuwen dalam Majalah *Intisari* Edisi Khusus Agustus 2010)”. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Van Dijk, T.A. (2004). *Ideology and Discourse: A Multidisciplinary Introduction*. Barcelona: Pompeu Fabra University.
- Walker, P. & Finney, N. (1999). *Skill Development and Critical Thinking in Higher Education*. London: Higher Education Research & Development Unit, University College.
- Yap, M.Y. (2019). *Here’s The Rundown on What’s Really Going On With The Protest in Indonesia*. Diakses dari: <https://sea.mashable.com/social-good/6419/heres-therundown-on-whats-really-going-on-with-the-protests-in-indonesia>. (20 November 2019).